**Nama : Andi Suci Khairunnisa**

**NIM : D121241085**

**Prodi : Teknik Informatika**

**Mata Kuliah : Wawasan Budaya dan Ipteks BMI**

**Insight Pertemuan Kedua**

Jum’at, 30 Agustus 2024 merupakan hari terakhir kuliah saya pada pekan ini. Maka dari itu, saya pun mengawali pagi saya dengan penuh semangat walau pada hari ini saya mempunyai dua mata kuliah. Pembelajaran mata kuliah pertama hari ini, Wawasan Budaya dan Ipteks BMI, dimulai sedikit terlambat karena jauhnya jarak antara tempat tinggal dosen yang mengajar dengan kampus. Mata kuliah ini dimulai pada pukul 08.20, lambat 30 menit dari jam yang ada di jadwal. Walau begitu, sebenarnya saya bersyukur karena 30 menit itu dapat kami gunakan untuk membaca ulang materi pekan lalu.

Seperti yang telah disepakati pada pekan lalu, bahwa pada setiap 15 menit awal di setiap pertemuan akan ada semacam kuis dimana mahasiswa akan diberi pertanyaan secara random atau acak, bila berhasil menjawab akan mendapat poin 2 dan bila tidak poin 1 yang telah diberikan akan dihanguskan menjadi 0. Kelas pagi ini pun dimulai dengan pemberian kuis pada beberapa mahasiswa secara acak. Kuis hari ini hanya ada satu jenis pertanyaan yaitu tentang apa yang kami ketahui mengenai Benua Maritim Indonesia. Kebanyakan mahasiswa/i di kelas saya menjawab bahwa Benua Maritim Indonesia itu tidak lepas dengan yang namanya laut. Intinya, dari yang saya tangkap dari pernyataan mereka, Benua Maritim Indonesia itu selalu membahas tentang laut dan hanya laut. Saya berkesimpulan mereka berpikir sedemikian rupa karena hanya terfokus pada kata maritim saja. Namun, mahasiswa terakhir yang diberi kesempatan untuk menjawab petanyaan tersebut memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Dia berpendapat di dalam frasa Benua Maritim Indonesia juga terdapat kata benua yang artinya bukan terfokus pada laut saja, benua maritim Indonesia juga fokus membahas daratan yang berasal dari definisi kata benua tersebut.

Akhirnya, dosen pun memberi jawaban bahwa jawaban yang paling mendekati ialah jawaban dari penjawab/mahasiswa terakhir itu. Dosen berpendapat bahwa dalam pembahasan lingkup Benua Maritim Indonesia fokus pembahasan kita itu bukan hanya berfokus pada laut tetapi juga pada darat dan udara. Sedangkan pengertian Budaya Maritim Indonesia secara teori ialah wilayah perairan dengan hamparan pulau-pulau di dalamnya sebagai satu kesatuan alamiah antara darat, laut dan udara diatasnya tertata unik dengan sudut pandang iklim dan cuaca, keadaan airnya, tatanan kerak bumi, keragaman biota serta tatanan sosial budayanya.

Dosen pun mulai menjelaskan bahwa konsep Benua Maritim Indonesia (BMI) itu baru ada pada tahun 1996, tepatnya 51 tahun telah Indonesia merdeka. Pada tahun 1996, sejumlah ilmuan dan teknokrat Indonesia mendorong konsep BMI sebagai penanda dari eksistensi Indonesia. Mereka dipimpin oleh B.J. Habibie melakukan pengkajian dan serangkaian lokakarya untuk merumuskan konsepsi BMI. Maka terlahirkanlah konsep BMI menurut pemikiran anak bangsa Indonesia pada tahun 1996 itu. Konsep mereka tentang BMI adalah berikut ini.

“BMI adalah bagian dari sistem planet bumi yang merupakan satu kesatuan alamiah antara darat, laut dan dirgantara di atasnya, tertata secara unik, menampilkan ciri-ciri benua dengan karakteristik yang khas dari sudut pandang iklim dan cuaca (klimatologi dan metereologi), keadaan airnya (oseanografi), tatanan kerak bumi (geologi), keragaman biota (biologi), serta tatanan sosial-budayanya (antropologi) yang menjadi wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung akan menggugah emosi, perilaku dan sikap mental dalam menentukan orientasi dan pemanfaatan unsur-unsur maritim di semua aspek kehidupan” (BPPT-Dewan Hankamnas, 1996).

Istilah Benua Maritim Indonesia resmi diperkenalkan oleh B.J. Habibie, pada sambutannya sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, Ketua BPPT/Kepala BPIS di Konvensi Nasional Benua Maritim Indonesia untuk mengaktualisasikan Wawasan Nusantara, pada tanggal 18 Desember 1996 di Kota Makassar. Pak Habibie menyebut BMI sebagai suatu paradigma baru untuk menyebut wilayah Indonesia dengan laut sebagai wilayah terluasnya yang ditaburi ribuan pulau yang bercirikan benua. Paradigma ini diharapkan dapat menggugah semangat dan emosi bangsa sehingga mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam penyelenggaraan pembangunan agar lebih memperhatikan unsur-unsur maritim, baik sebagai sumber maupun obyek pembangunan.

Menurut pemaparan dosen kami, pada mulanya, sebelum tahun 1996, fokus pemerintah dalam pembangunan Indonesia itu lebih berfokus ke agraris. Ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, wilayah negara Indonesia tidak seperti yang kita kenal saat ini. Berdasarkan [Sidang BPUPKI 11 Juli 1945](https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sidang-bpupki-dinamika-penentuan-bentuk-dan-wilayah-indonesia-merdeka" \t "_blank), diputuskan bahwa yang masuk dalam Indonesia Merdeka adalah wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaka, Borneo Utara, Papua, Timor dan kepulauan sekelilingnya.

Wilayah laut Hindia Belanda saat itu hanya merupakan jalur laut selebar 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tersurut yang melingkari setiap pulau. Kalau ditotal, luas keseluruhan wilayah laut Indonesia saat itu tidak sampai satu juta kilometer persegi.

Di luar itu, statusnya merupakan perairan internasional atau laut bebas. Jadi sebagian besar Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Arafura, dan lainnya merupakan perairan internasional. Sebagai perairan internasional, berbagai kapal asing dapat berlayar dengan bebas di wilayah tersebut. Dengan demikian, secara hukum terdapat kesan bahwa unsur laut lebih merupakan pemisah antar pulau-pulau di Nusantara.

Karena sebagian besar wilayah laut Indonesia adalah perairan internasional hukum laut yang berlaku saat itu sangatlah rawan terhadap keamanan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Bebasnya wilayah perairan Indonesia untuk di masuki oleh kapal-kapal asing memunculkan potensi ancaman keamanan dan kedaulatan negara. Masuknya aliran-aliran sesat seperti sktivis teroris, penyebaran narkoba, dan penyelundupan berbagai barang maupun jasa ilegal lainnya menjadi lebih mudah karena hal ini.

Untuk mengatasi situasi kritis itu,  pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Ir. Djuanda Kartawijaya mendeklarasikan “Pengumuman Pemerintah mengenai Perairan Negara Republik Indonesia” yang kelak lebih dikenal sebagai “Deklarasi Djuanda”.

Deklarasi itu menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia.

Lalu lintas yang damai bagi kapal-kapal asing di perairan pedalaman ini dijamin selama dan sekadar tidak bertentangan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau terluar dari wilayah negara Indonesia pada saat air laut surut.

Tentunya, deklarasi tersebut mendapatkan banyak tantangan dan protes dari beberapa negara yang merasa kepentingan maritimnya terganggu. Nota protes diplomatik dari negara-negara maritim besar, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Belanda, Perancis, dan Selandia Baru mengalir melalui Departemen Luar Negeri RI.

Indonesia dengan mengerahkan para ahli hukum lautnya dan lewat diplomasi di berbagai forum internasional terus memperjuangkan ketetapan tentang wilayah hukum laut yang baru yang telah memberi wajah baru geopolitik Indonesia.

Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan internasional terus dilakuakn untuk meyakinkan dunia internasional tentang konsep Wawasan Nusantara yang memandang darat dan laut kepulauan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Kurang lebih, ada 25 tahun untuk Indonesia memperjuangkan hal tersebut.

Akhirnya, pada pertemuan Konvensi Hukum Laut PBB ke-3 konsep Wawasan Nusantara akhirnya diakui dunia sebagai The Archipelagic Nation Concept. Di situ ditetapkan laut teritorial negara kepulauan adalah selebar 12 mil dari garis dasar atau *base line*terluar pulau-pulau dan ZEE selebar 200 mil dari garis dasar. Melalui UNCLOS 1982, luas laut Indonesia juga bertambah, dari sebelumnya kurang dari satu juta kilometer persegi menjadi 5,8 juta kilometer persegi.

Mendengar sejarah panjang maritim Indonesia dalam merebut dan mempertahankan wilayah kelautannya yang penuh akan rintangan tentunya sangat memotivasi kami sebagai mahasiswa untuk menjadi penerus bangsa yang dapat terus menerus menjaga dan mempertahankan apa yang telah diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang negara terdahulunya.